

Pengukuran Output Ekonomi: Perspektif Islam Dan Konvensional Dalam Menilai Kesejahteraan Sosial

Satria Darma^{1*}

¹Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Panyabungan, Indonesia

Email: ^{1*}satriadarmamhammad@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Pengukuran output ekonomi adalah aspek penting dalam analisis ekonomi, dan selama ini Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi fokus utama. Namun, kritik terhadap keterbatasan PDB telah mendorong pengembangan pendekatan alternatif, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kebahagiaan Dunia. Di samping itu, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang unik dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan materi dan kesejahteraan spiritual, serta memperhitungkan aspek-aspek seperti keadilan distribusi dan keberlanjutan. Artikel ini membahas berbagai pendekatan dalam pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan, serta membandingkan perspektif Islam dan konvensional. Integrasi antara metode pengukuran konvensional dan prinsip ekonomi Islam dapat memberikan wawasan baru dalam mengukur dan memahami kesejahteraan dalam masyarakat, dengan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan secara holistik dan inklusif.

Kata Kunci: Pengukuran Output Ekonomi, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Sosial.

Abstract – Measuring economic output is an important aspect in economic analysis, and so far Gross Domestic Product (GDP) has been the main focus. However, criticism of GDP's limitations has prompted the development of alternative approaches, including the Human Development Index (HDI) and the World Happiness Index. In addition, Islamic economics offers a unique perspective by emphasizing the balance between material growth and spiritual well-being, as well as taking into account aspects such as distributional justice and sustainability. This article discusses various approaches to measuring economic output and welfare, and compares Islamic and conventional perspectives. Integration between conventional measurement methods and Islamic economic principles can provide new insights in measuring and understanding welfare in society, with the potential to improve welfare in a holistic and inclusive manner.

Keywords: Measurement of Economic Output, Gross Domestic Product, Human Development Index, Islamic Economics, Social Welfare.

1. PENDAHULUAN

Pengukuran output ekonomi telah lama menjadi fokus utama dalam analisis ekonomi, dengan Pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi salah satu metode yang dominan. PDB dianggap sebagai indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara, meskipun kritik terhadap kecenderungan PDB sebagai satu-satunya pengukuran kesejahteraan telah menimbulkan kebutuhan akan pendekatan alternatif. Salah satu alternatif yang muncul adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup faktor-faktor sosial, kesehatan, pendidikan, dan bahkan kebahagiaan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat (Samuelson, P. A., & Nordhaus 2009; Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi 2010).

Di samping itu, pendekatan ekonomi Islam telah menyoroti pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan materi dan kesejahteraan spiritual dalam menilai kesejahteraan suatu masyarakat. Pendekatan ini menawarkan pandangan holistik yang tidak hanya memandang output ekonomi, tetapi juga aspek-aspek kesejahteraan spiritual dan sosial (Chapra 2008; Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs 2012). Kritik terhadap keterbatasan PDB sebagai pengukur tunggal kesejahteraan telah mempercepat perkembangan indeks alternatif, termasuk yang berasal dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan ((UNDP) 1990).

Pengukuran PDB telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana Teori Pengeluaran yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes bahwa “PDB sebagai jumlah total pengeluaran dalam suatu ekonomi. Pengeluaran ini terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan ekspor bersih (ekspor dikurangi impor). Dalam teori ini, PDB diukur dengan

menjumlahkan semua pengeluaran tersebut. Keynes juga mengemukakan teori Permintaan Agregat, dimana melihat PDB sebagai jumlah permintaan agregat dalam ekonomi, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam teori ini, PDB diukur dengan menjumlahkan semua permintaan agregat tersebut (Keynes 1936).

Simon Kuznets dalam teori produksinya menganggap PDB sebagai nilai total produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua kegiatan produksi dalam ekonomi, termasuk upah, keuntungan, dan pajak atas produksi. Dia juga menggunakan teori pendapatan, dimana melihat PDB sebagai jumlah total pendapatan yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi dalam suatu ekonomi. Faktor-faktor produksi ini termasuk upah buruh, keuntungan perusahaan, bunga dari modal, dan sewa dari properti. Dalam teori ini, PDB dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan faktor produksi (Kuznets 1941).

Serdangkan Wassily Leontief dalam bukunya *Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the United States* mengungkapkan pengukuran PDB menggunakan Teori Input-Output, dimana teori ini menggunakan tabel input-output untuk mengukur PDB dengan menganalisis hubungan antara berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam teori ini, PDB diukur dengan melihat seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi dan bagaimana nilai tambah tersebut mengalir di antara sektor-sektor tersebut (Leontief 1936).

Setiap teori ini memberikan sudut pandang yang berbeda dalam mengukur PDB, dan seringkali digunakan secara bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Namun, meskipun terdapat banyak pendekatan dalam pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan, masih terdapat kompleksitas yang perlu dipahami lebih dalam. Integrasi antara metode konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami kompleksitas ini, kita dapat mengeksplorasi cara-cara baru dalam mengukur dan memahami kesejahteraan, yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih inklusif dan holistik.

Pentingnya penelitian ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengisi celah dalam pemahaman kita tentang kesejahteraan ekonomi. Dengan mendasarkan analisis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengintegrasikannya dengan metode konvensional, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya berguna bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, tetapi juga bagi para akademisi dalam memperluas pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan dalam konteks yang lebih holistik.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membuka pintu bagi inovasi dalam pengembangan instrumen pengukuran yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi serta implementasi praktik ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi kemungkinan adopsi oleh lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman tentang pentingnya integrasi antara metode konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini dapat memengaruhi arah kebijakan dalam rangka menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi literatur kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian, dalam hal ini adalah pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan dalam konteks

ekonomi syariah dan konvensional, melalui analisis terhadap teks-teks yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang terkait.

Tahap awal penelitian adalah mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti, yaitu perbandingan pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah dan konvensional. Peneliti melakukan pencarian literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Literatur yang dicari mencakup teori-teori ekonomi, konsep-konsep dalam ekonomi syariah dan konvensional, serta metode pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan. Setelah pencarian literatur dilakukan, peneliti melakukan seleksi terhadap literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk disertakan dalam penelitian ini. Kriteria seleksi meliputi relevansi dengan masalah penelitian, kebaruan informasi, dan kredibilitas sumber.

Peneliti melakukan analisis terhadap literatur yang telah dipilih. Analisis dilakukan dengan memeriksa secara seksama konten dari setiap sumber literatur, mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan perbedaan antara pendekatan ekonomi syariah dan konvensional dalam pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan. Penyusunan Teks Penelitian: Berdasarkan hasil analisis literatur, peneliti menyusun teks penelitian yang mencakup pemahaman mendalam tentang perbandingan pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan dalam ekonomi syariah dan konvensional. Teks penelitian disusun secara logis untuk menggambarkan urutan pemikiran dan hasil penelitian sesuai dengan harapan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran output ekonomi secara tradisional dilakukan melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu ekonomi dalam periode tertentu (Samuelson, P. A., & Nordhaus 2009). PDB sering dianggap sebagai indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara, namun tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial atau distribusi kekayaan di dalam masyarakat (Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi 2010).

Kritik terhadap PDB sebagai ukuran tunggal kesejahteraan telah mendorong pengembangan indeks alternatif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggabungkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan sosial ((UNDP) 1990). IPM menawarkan perspektif yang lebih luas tentang kualitas hidup dan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya esensial untuk pengembangan manusia.

Di sisi lain, Indeks Kebahagiaan Dunia memperkenalkan dimensi subjektif kesejahteraan, dengan mengukur faktor-faktor seperti kepuasan hidup, dukungan sosial, dan kebebasan untuk membuat pilihan hidup (Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs 2012). Pendekatan ini menekankan pentingnya kesejahteraan emosional dan hubungan sosial sebagai komponen penting dari kesejahteraan umum.

Pendekatan ekonomi Islam atau ekonomi syariah terhadap pengukuran output dan kesejahteraan menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan material dan kesejahteraan spiritual. Ekonomi Islam mengadvokasi untuk pengembangan ekonomi yang memperhatikan keadilan, distribusi kekayaan yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar semua anggota masyarakat, sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Shariah* (Chapra 2008). Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap kesejahteraan, yang tidak hanya fokus pada output ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat. Pengukuran output ekonomi dan kesejahteraan merupakan area yang kompleks dan multifaset. Meskipun PDB tetap menjadi alat pengukuran yang dominan, kritik terhadap keterbatasannya telah menghasilkan pengembangan indeks alternatif yang mencoba menggabungkan faktor-faktor sosial, kesehatan, pendidikan, dan bahkan kebahagiaan. Pendekatan ekonomi Islam menawarkan perspektif unik dengan menekankan pada keseimbangan dan keadilan sebagai komponen penting dari kesejahteraan. Integrasi antara metode pengukuran konvensional dan prinsip ekonomi Islam dapat memberikan wawasan baru dalam mengukur dan memahami kesejahteraan dalam masyarakat.

3.1 Konsep dan Metodologi Pengukuran PDB Syariah

Pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) dalam konteks ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dengan nilai-nilai dan aturan syariah. Metodologi pengukuran PDB syariah mengadaptasi kerangka kerja standar PDB dengan mengintegrasikan elemen-elemen ekonomi Islam, termasuk pengecualian aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah (Chapra 2008).

PDB syariah bertujuan untuk mengukur output ekonomi suatu negara dengan mempertimbangkan hanya transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) (Usmani 2002). Ini berarti bahwa aktivitas ekonomi seperti perbankan konvensional, asuransi, dan investasi spekulatif tidak dihitung dalam pengukuran PDB syariah.

Metodologi pengukuran PDB syariah juga memperhitungkan kontribusi zakat dan infak sebagai faktor penting dalam ekonomi. Zakat, khususnya, diakui sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang signifikan dan, oleh karena itu, harus dipertimbangkan dalam menghitung output ekonomi (Kahf 1999). Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengukur kesejahteraan ekonomi secara lebih inklusif dan adil.

Selain itu, PDB syariah memperhatikan keberlanjutan dan keadilan dalam penggunaan sumber daya alam. Aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan dan tidak mematuhi prinsip keberlanjutan tidak seharusnya berkontribusi pada pengukuran PDB syariah (Nasr 2015). Ini mencerminkan komitmen ekonomi Islam terhadap konservasi dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Implementasi pengukuran PDB syariah menghadapi tantangan metodologis, termasuk penentuan kriteria untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi sebagai "*syariah-compliant*" dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka kerja pengukuran ekonomi nasional. Kerjasama antara ilmuwan ekonomi, ahli syariah, dan lembaga statistik nasional diperlukan untuk mengembangkan standar yang konsisten dan dapat diandalkan (Warde 2000).

Pengukuran PDB syariah menawarkan perspektif baru dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dengan mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Metodologi ini tidak hanya mencerminkan output ekonomi yang sesuai dengan syariah tetapi juga menekankan pada kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Pengembangan dan implementasi PDB syariah memerlukan kolaborasi multidisiplin untuk memastikan bahwa pengukuran tersebut akurat dan mencerminkan realitas ekonomi syariah. Pendekatan ini membuka jalan bagi penilaian yang lebih holistik terhadap kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3.2 Perbandingan Pengukuran Output Ekonomi: Pendekatan Islam vs Konvensional

Pengukuran output ekonomi merupakan aspek kritis dalam analisis ekonomi untuk menilai kesehatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendekatan konvensional dan Islam terhadap pengukuran output ekonomi menawarkan perspektif yang berbeda, masing-masing dengan metodologi dan kriteria yang unik (Chapra 2008).

Pendekatan konvensional terhadap pengukuran output ekonomi umumnya difokuskan pada Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB konvensional dianggap sebagai indikator utama kesehatan ekonomi, meskipun sering dikritik karena tidak mempertimbangkan distribusi pendapatan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Samuelson, P. A., & Nordhaus 2009).

Dalam kontras, pendekatan ekonomi Islam terhadap pengukuran output ekonomi menekankan pada penciptaan kekayaan yang adil dan distribusi yang merata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam mengadvokasi untuk pengukuran output yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi tetapi juga faktor-faktor seperti keadilan sosial, kesejahteraan individu, dan keberlanjutan lingkungan (Usmani 2002).

Salah satu aspek unik dari pendekatan ekonomi Islam adalah penolakannya terhadap riba (bunga), yang mengakibatkan eksklusi aktivitas keuangan berbasis bunga dari pengukuran output ekonomi. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem keuangan yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah, yang lebih mencerminkan keterlibatan nyata dalam aktivitas ekonomi dan pembagian risiko yang adil (El-Gamal 2006).

Selain itu, ekonomi Islam memasukkan konsep zakat sebagai alat redistribusi pendapatan yang penting, yang secara langsung mempengaruhi pengukuran output ekonomi dengan menilai bagaimana kekayaan didistribusikan untuk membantu yang kurang mampu dan mendukung proyek-proyek sosial (Kahf 1999).

Pendekatan Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali diabaikan dalam pengukuran output ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, penggunaan sumber daya harus mematuhi prinsip khalifah, yaitu tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi (Nasr 2015).

Tabel 1. Perbandingan Antara Pendekatan Konvensional Dan Islam Dalam Pengukuran Output Ekonomi

Aspek	Pendekatan Konvensional	Pendekatan Islam
Fokus Utama	PDB (Produk Domestik Bruto)	Kekayaan yang adil dan distribusi yang merata sesuai dengan syariah
Indikator Utama	Kuantitas produksi barang dan jasa	Pertumbuhan kualitatif, keadilan sosial, keberlanjutan
Penilaian Terhadap Distribusi Kekayaan	Kurang memperhatikan distribusi kekayaan secara merata	Mengadvokasi distribusi kekayaan yang adil dan merata
Perlakuan Terhadap Riba	Memperbolehkan aktivitas keuangan berbasis bunga	Menolak riba, mendorong sistem keuangan berbasis bagi hasil
Peran Zakat	Tidak termasuk dalam perhitungan output ekonomi	Dianggap sebagai alat redistribusi pendapatan yang penting
Konsiderasi Terhadap Lingkungan	Kadang-kadang diabaikan dalam pengukuran ekonomi	Memperhitungkan tanggung jawab terhadap lingkungan

Tabel ini menggambarkan perbedaan dalam pendekatan konvensional dan Islam dalam pengukuran output ekonomi, menyoroti fokus utama, indikator utama, perlakuan terhadap distribusi kekayaan, perlakuan terhadap riba, peran zakat, dan konsiderasi terhadap lingkungan.

Perbandingan antara pendekatan Islam dan konvensional dalam pengukuran output ekonomi mengungkapkan perbedaan mendasar dalam filosofi dan metodologi. Sementara pendekatan konvensional fokus pada pertumbuhan kuantitatif, ekonomi Islam memberikan bobot yang sama pada pertumbuhan kualitatif, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Integrasi antara kedua pendekatan ini dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dalam mengukur kesejahteraan ekonomi, menekankan pentingnya output ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi juga adil dan berkelanjutan.

3.3 Integrasi Pengukuran Output Ekonomi: PDB Syariah dan Konvensional

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) telah lama menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara. Namun, dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan kebutuhan akan penilaian yang lebih holistik, terdapat permintaan untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam pengukuran PDB. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah PDB yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

PDB berbasis syariah mencoba untuk memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengukuran output ekonomi suatu negara. Hal ini termasuk aspek-aspek seperti keadilan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan umum. Dalam PDB syariah, sektor-sektor ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti industri alkohol atau perjudian, mungkin tidak diperhitungkan atau diberi bobot yang lebih rendah (Khan 2017).

Perbedaan dalam pengukuran output ekonomi antara PDB syariah dan konvensional dapat menimbulkan tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi data antara kedua pendekatan ini. Pengelompokan sektor-sektor ekonomi yang berbeda dalam PDB syariah dan konvensional dapat menyulitkan perbandingan langsung antara keduanya. Selain itu, perbandingan kinerja ekonomi antar negara yang menggunakan PDB syariah dan konvensional juga bisa menjadi rumit karena perbedaan dalam konsep dan metode pengukuran (Hani'ah, I., & Pebruary 2024; Iqbal 2005; Purwanto 2021).

Integrasi pengukuran output ekonomi antara PDB syariah dan konvensional merupakan langkah penting dalam memahami dinamika ekonomi modern. Meskipun terdapat tantangan dalam harmonisasi data dan interpretasi hasil, pendekatan ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam pengukuran output ekonomi, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang kontribusi ekonomi terhadap kesejahteraan umum dan keberlanjutan (Ahmed, Z., Ahmad, M., Rjoub, H., Kalugina, O.A., Hussain 2022).

3.4 Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam dan Konvensional

Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan utama dari setiap sistem ekonomi, baik yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam maupun yang konvensional. Namun, definisi dan pengukuran kesejahteraan seringkali berbeda antara kedua sistem tersebut. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi materi atau finansial, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti keadilan, distribusi yang adil, dan keberdayaan ekonomi masyarakat (Haneef 2015).

3.5 Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam bukanlah sekadar mencapai kemakmuran materi, tetapi juga melibatkan keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya. Indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam merangkum dimensi-dimensi ini secara holistik, menciptakan landasan bagi sistem ekonomi yang berorientasi pada keberdayaan dan keadilan sosial (Ahmad 2017).

Pertama-tama, indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya eliminasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi melalui sistem zakat dan sedekah yang mampu menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat sebagai pilar utama dalam ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan ekonomi yang inklusif (Siddiqi 2006).

Selain itu, keberhasilan ekonomi dalam perspektif Islam juga diukur dari tingkat pengangguran yang rendah dan peluang kerja yang merata. Sistem ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan mempromosikan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga semua anggota masyarakat dapat berkontribusi dan merasakan manfaatnya (Khan 2006).

Indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam juga memperhatikan kualitas hidup dan kesejahteraan spiritual. Selain memenuhi kebutuhan materi, ekonomi Islam juga memperhatikan aspek-aspek psikologis dan spiritual, memastikan bahwa masyarakat merasa aman, tenteram, dan memiliki kedamaian batin (Chapra 2000).

Dengan demikian, indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi-dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual, menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penerapan indikator ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh ekonomi Islam (Islahi 1988).

3.6 Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional seringkali diukur dengan indikator-indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, dan indeks kebahagiaan. Meskipun penting, penggunaan indikator ini dapat memberikan gambaran yang terbatas tentang kesejahteraan masyarakat, karena seringkali mengabaikan aspek-aspek sosial dan lingkungan (Stiglitz, Joseph E. 2010).

Pertama-tama, PDB sering dijadikan tolok ukur utama dalam mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Namun, PDB cenderung tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata dan tidak memperhitungkan kerugian lingkungan atau ketidaksetaraan sosial yang mungkin terjadi (Costanza, R 2013).

Selanjutnya, tingkat pengangguran sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi karena rendahnya tingkat pengangguran dianggap sebagai tanda kemakmuran. Namun, indikator ini tidak mempertimbangkan kualitas pekerjaan, seperti upah yang layak, keamanan kerja, dan kesempatan untuk pengembangan karier (Blau, F.D. 2017).

Indeks kebahagiaan atau kepuasan hidup juga menjadi salah satu indikator yang semakin populer dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Meskipun memberikan wawasan yang berharga, indeks ini seringkali bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi seperti hubungan sosial, kesehatan mental, dan lingkungan fisik (Diener, Ed 1996).

Dengan demikian, meskipun ekonomi konvensional telah mengembangkan sejumlah indikator untuk mengukur kesejahteraan, masih diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang memperhitungkan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan psikologis. Integrasi indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sen 1999).

Tabel 2. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Islam dan Konvensional

Indikator Kesejahteraan	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
Pendekatan	Holistik, mencakup keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya.	Terbatas pada aspek-aspek ekonomi dengan fokus pada materi, sering mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.
Indikator Utama	Zakat, sedekah, eliminasi kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi.	Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, indeks kebahagiaan.
Pertimbangan Distribusi	Memastikan distribusi kekayaan yang adil dan inklusif melalui zakat dan sedekah.	Tidak memperhitungkan distribusi pendapatan yang merata dan kerugian lingkungan.
Penilaian Kualitas Pekerjaan	Menekankan penciptaan lapangan kerja yang layak dan merata, serta partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.	Fokus pada tingkat pengangguran tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan seperti upah layak dan keamanan kerja.
Aspek Kesejahteraan Spiritual	Memperhatikan kualitas hidup dan kesejahteraan spiritual, melampaui kebutuhan materi.	Kurang memperhitungkan aspek psikologis dan spiritual dalam kebahagiaan masyarakat.
Tujuan Akhir	Menciptakan masyarakat adil, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan prinsip-prinsip Islam.	Mencapai kesejahteraan yang terbatas pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan secara menyeluruh.

Salah satu perbedaan utama antara indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam dan konvensional adalah dalam pendekatan terhadap kekayaan dan distribusi. Dalam ekonomi Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab (Sukanto & Aisah 2021). Oleh karena itu, indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi kekayaan yang adil dan kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi (Kahf 2003).

Di sisi lain, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan seringkali diukur secara eksklusif melalui parameter-parameter seperti Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun parameter-parameter ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan materi suatu negara, namun seringkali gagal memperhitungkan aspek-aspek non-materi seperti keadilan sosial dan keberdayaan ekonomi masyarakat (Sen 1999).

Pemahaman tentang indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam dan konvensional memiliki implikasi yang penting dalam perumusan kebijakan ekonomi. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek non-materi seperti keadilan dan keberdayaan ekonomi, indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kondisi ekonomi dan sosial suatu negara. Namun, demikian, integrasi antara indikator kesejahteraan dalam kedua sistem ekonomi tersebut dapat menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Pengukuran output ekonomi adalah elemen penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara. Namun, pendekatan konvensional yang menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tolok ukur utama sering kali tidak mencerminkan kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh. Kritik terhadap keterbatasan PDB telah mendorong pengembangan indeks alternatif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kebahagiaan Dunia, yang mencoba menggabungkan faktor-faktor sosial, kesehatan, dan kebahagiaan dalam pengukuran kesejahteraan.

Di sisi lain, pendekatan ekonomi Islam menawarkan perspektif yang unik dengan menekankan pada keadilan, distribusi kekayaan yang adil, dan keseimbangan antara pertumbuhan material dan kesejahteraan spiritual. Ekonomi Islam tidak hanya memperhitungkan output ekonomi, tetapi juga aspek-aspek seperti zakat, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan spiritual masyarakat.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metode pengukuran yang mencerminkan kesejahteraan secara holistik, dengan mengintegrasikan indikator-indikator ekonomi konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kolaborasi antara ilmuwan ekonomi, ahli syariah, dan lembaga statistik nasional diperlukan untuk mengembangkan standar yang konsisten dan dapat diandalkan dalam pengukuran output ekonomi berbasis syariah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan penggunaan indikator kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pentingnya kesejahteraan holistik dalam pembangunan ekonomi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesejahteraan ekonomi dan mampu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat.

REFERENCES

- (UNDP), United Nations Development Programme. 1990. "Concept and Measurement of Human Development." *Human Development Report*.
- Ahmad, K. 2017. "Dimensions of Socio-Economic Justice in Islam." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13(3):159-70.
- Ahmed, Z., Ahmad, M., Rjoub, H., Kalugina, OA., Hussain, N. 2022. "Economic Growth, Renewable Energy Consumption, and Ecological Footprint: Exploring The Role of Environmental Regulations and

- Democracy in Sustainable Development.” *Sustainable Development* 30(4):595–605.
- Blau, F.D., & Lawrence M. K. 2017. “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations.” *Journal of Economic Literature* 55(3):789–865.
- Chapra, M. U. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. 2008. “The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah. In K. Alam (Ed.), *Theoretical Foundations of Islamic Economics*.” *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* 22–41.
- Costanza, R, et al. 2013. “Beyond GDP: Measuring and Achieving Global Genuine Progress.” *Ecological Economics* (93):57–68.
- Diener, Ed, et al. 1996. “New Measures of Well-Being.” *Social Indicators Research* 39(3):247–66.
- El-Gamal, M. A. 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haneef, M. A. 2015. *Islamic Economics: An Introduction*. In M. Kabir Hassan & M. K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Hani’ah, I., & Pebruary, S. 2024. “Examining the Impact of Zakah and Islamic Finance on National Economic Growth.” *Journal of Islamic Economics and Finance (JEKI)* 10(1):115–30.
- Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. 2012. *Sustainable Development Solutions Network*.
- Iqbal, M. 2005. *Islamic Finance and Economic Development*. McMillan: Palgrave McMillan.
- Islahi, A. A. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Leicester: Islamic Foundation.
- Kahf, M. 1999. *The Performance of Islamic Banks*. In M. Iqbal & D. T. Llewellyn (Eds.), *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Kahf, M. 2003. *Principles of Islamic Finance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Keynes, J. M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan: Palgrave.
- Khan, H. F. 2017. “Islamic Banking: On Its Way to Globalization.” *International Journal of Management Research & Review* 7(11):1006–14.
- Khan, M. F. 2006. “Unemployment in an Islamic State.” *Review of Islamic Economics* 10(2):5–22.
- Kuznets, S. 1941. “National Income and Its Composition, 1919-1938.” *National Bureau of Economic Research*.
- Leontief, W. W. 1936. “Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the United States.” *The Review of Economics and Statistics* 18(3):105–25.
- Nasr, S. H. 2015. *Islamic Environmentalism*. In I. Z. Ahmed (Ed.), *The Oxford Handbook of Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Purwanto, H. & Siswahadi. 2021. “Paradigm of National Income In Islamic Economy.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur`an Dan Hukum* 7(1).
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. 2009. *Economics*. New York: McGraw-Hill.
- Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Siddiqi, M. N. 2006. *Role of Zakat in Alleviating Poverty and Ensuring Socioeconomic Justice: A Case Study of Pakistan*. International Institute of Islamic Economics.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. 2010. “Economic Performance and Social Progress.” *Report of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)*.
- Stiglitz, Joseph E., et al. 2010. “Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up.” *The New Press*. Retrieved February 2, 2024 (<https://wcfia.harvard.edu/publications/mismeasuring-our-lives-why-gdp-doesnt-add>).
- Sukamto & Aisah, S. 2021. “Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra Dengan Kebikakan Moneter Di Indonesia.” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12(2):165–80.
- Usmani, M. T. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. London: Hague.
- Warde, I. 2000. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.